

PEMULIHAN LINGKUNGAN USAHA*

Bambang Sudibyo

Universitas Gadjah Mada

ABSTRAK

Krisis ekonomi Indonesia sekarang ini terjadi karena sebagai suatu entitas peradaban Indonesia memang sedang dalam keadaan rentan, baik pada dimensi ekonomi, politik, sosial, kultural, dan siklusnya dalam sejarah. Market confidence merosoi drastis karena pembusukan multi-dimensional itu. Dalam artikel ini penulis menguraikan tidak memadainya paradigma pemulihan yang masih mengungkung pemikiran banyak pejabat Pemerintah dan pengamat ekonomi karena paradigma ini pada substansinya anti reformasi, pro status quo, dan retrospektif. Sebagai gantinya penulis menyodorkan paradigma reformasi. Paradigma reformasi ini harus mangkerangkai proses sosial pembentukan kontrak sosial baru yang akan menggantikan kontrak sosial lama yang selama ini diberi label Orde Baru. Proses keluar dari krisis dipandang sebagai proses formatif pembentukan sinergi baru yang dikerangkai oleh kontrak sosial baru tersebut.

1. PENYEBAB MULTIDIMENSIONAL DARI KRISIS LINGKUNGAN USAHA MULTI-DIMENSIONAL

Krisis lingkungan usaha multidimensional Indonesia dewasa ini disebabkan oleh banyak faktor multidimensional yang terjadi secara kontemporer pada akhir dekade 1990an. Pada dimensi ekonomi paling tidak ada dua faktor penting penyebab krisis. Faktor pertama adalah krisis moneter Asia yang disebabkan oleh buruknya sistem keuangan dan perbankan di Asia Timur dan Tenggara pada umumnya terutama di Indonesia. Krisis ini menyebabkan banyak investor menarik modalnya dari Asia Timur dan Tenggara yang selama tiga dekade terakhir menjadi sorga investasi karena tingkat pertumbuhannya yang tertinggi di dunia dan tidak ada taranya dalam sejarah. Di Indonesia buruknya sistem keuangan dan perbankan ini diindikasikan oleh

* Tulisan inipernah dipresentasikan pada Seminar dalam rangka Sidang Plena ISEI ke-9, tanggal 27 Agustus 1998 di Jakarta.

tingginya tingkat kredit macet yang disebabkan oleh praktek perbankan yang tidak prudent, tingginya praktek illegal banking, sangat buruknya kontrol Bank Indonesia terhadap praktek perbankan, dan tingginya campur tangan kekuasaan yang korup terhadap kebijakan perbankan. Faktor ke dua adalah sangat tingginya tingkat leverage perekonomian Indonesia, baik pada sektor swasta maupun publik, baik dalam rupiah maupun valuta asing, sehingga solvabilitas perekonomian dan posisi neraca pembayaran menjadi sangat rentan terhadap guncangan sekecil apa pun. Oleh karena itu sungguh tidak berdasar pernyataan Bank dunia menjelang krisis yang mengatakan bahwa fundamen ekonomi Indonesia kokoh. Rentannya fundamen ekonomi Indonesia menjelang krisis sebetulnya sudah kelihatan dari tiga variabel utama indikator kestabilan ekonomi, yaitu tingkat inflasi, tingkat bunga, dan kurs rupiah. Dari tiga variabel kunci tersebut hanya satu, yaitu tingkat inflasi, yang bisa dibilang wajar. Tingkat bunga Indonesia telah bertahun-tahun menduduki ranking tertinggi di kawasan APEC, dan kurs rupiah selama dua dasa warsa terakhir secara terus menerus mengalami depresiasi 4% sampai 5% per tahun. Dua indikator ini saja sebetulnya sudah cukup jelas menunjukkan bahwa fundamen ekonomi Indonesia tidak bisa dibilang kokoh.

Pada dimensi politik, sistem politik Orde Baru yang mapan selama tiga dekade terakhir, pada akhir dekade 1990an telah mencapai titik nadir dalam proses pemhusukannya yang disebabkan oleh berbagai entrophy yang melekat pada dirinya sendiri, sementara sistem itu sendiri adalah sistem tertutup yang tidak lentur dan tidak mampu mengkoreksi serta memperbaharui dirinya sendiri. Sistem politik represif yang diterapkan Soeharto secara terus menerus dan tambal sulam hams menutupi berbagai patologinya sendiri yang rata-rata menyangkut pelanggaran HAM, sambil senantiasa berusaha mengakomodasikan pening-katan aspirasi sosial dan politik masyarakat sebagai konsekwensi logis keberhasilan pembangunan ekonomi, dan mengakomodasi tekanan politik internasional yang meningkat karena adanya proses integrasi secara mondial. Terbukti sistem politik yang dikembangkan Soeharto itu tidak mampu melakukan tiga hal yang tidak bisa ditawar itu secara simultan. Sementara itu, Soeharto sebagai tokoh kuat yang selama tiga dekade terakhir menjadi pusat titik berat atau center of gravity sistem politik dan ekonomi Indonesia dan karenanya menjadi angkor dan simbol kestabilan, pada akhir dekade 1990an

mencapai umur cukup lanjut yang menyebabkan pasar dan masyarakat ragu akan keefektifannya dalam memelihara dan mempertahankan keseimbangan politik dan ekonomi. Ketidak-menentukan lingkungan politik di Indonesia pada dekade 1990an diuraikan dengan baik oleh Schwarz (1994) dalam bukunya yang berjudul "A Nation in Waiting." Karena bekerjanya faktor-faktor politis ini secara bersama-sama, ekonomi Indonesia pada akhir dekade 1990an mengandung resiko politik atau *sovereign risk* yang sangat tinggi.

Pada dimensi sosial, lingkungan bisnis di Indonesia dibebani oleh sentimen sosial yang disebabkan oleh terlalu tingginya tingkat kesenjangan kemakmuran antara kelas bawah di satu sisi dan kelas menengah serta elit di sisi yang lain. Kesenjangan ini disebabkan keberhasilan pembangunan yang telah berlangsung selama enam seri PELITA dalam mengubah struktur ekonomi tidak dibarengi oleh keberhasilan yang sepadan dalam mengubah struktur sosial. Sebagai contoh, pada 1997, sektor pertanian yang perannya dalam pembentukan PDB telah turun menjadi sekitar 17% masih dihuni oleh sekitar 47% penduduk. Ini adalah suatu contoh tentang bukti empiris kegagalan pembangunan untuk mentransformasikan kelas bawah di sektor tradisional menjadi kelas menengah di sektor moderen. Sentimen sosial ini diperparah oleh sentimen etnis yang dipicu oleh kenyataan bahwa kelas menengah baru yang diciptakan oleh pembangunan didominasi oleh kelompok etnis non-pribumi, sehingga muncul kemarahan di kalangan pribumi yang ditimbulkan oleh persepsi bahwa pembangunan hanyalah untuk kelompok penguasa dan kelompok etnis non-pribumi saja dan bukan untuk mereka. Muatan sentimen sosial dan etnis itu selanjutnya diperparah oleh sentimen agama yang dipicu oleh fakta bahwa mayoritas pribumi adalah muslim sementara mayoritas non-pribumi adalah non muslim. Bertumpang-tindihnya sentimen sosial dengan dua sentimen primordial itu membuat kehidupan sosial di Indonesia menjadi sangat *touchy* (Sudibyo, 1997), dan telinga pasar uang, modal, dan barang yang dikuasai etnik minoritas nonpribumi itu menjadi *over sensitive* terhadap berbagai isu kerusuhan sosial.

Pada dimensi kultural, secara kebetulan pada dekade 1980an dan 1990an Indonesia sedang dijangkiti oleh gejala anomie dan liminalitas, yaitu penyakit budaya yang biasa mewabah pada masyarakat transisional dari peradaban agraris ke peradaban industrial, di mana orang sudah mulai melepas nilai-nilai agrarisnya tetapi

belum berhasil menggapai nilai-nilai baru yang industrial, sehingga banyak orang secara psikologis dan kultural menjadi limbung karena kehilangan pegangan kulturalnya (Sairin, 1998). Keadaan ini ditandai oleh meningkatnya berbagai bentuk kriminalitas dan kekerasan, perbuatan-perbuatan amoral termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan maraknya aktivitas ritual keagamaan yang menunjukkan upaya banyak orang untuk mencari pegangan spiritual yang dipercayainya sebagai pegangan yang lebih absolut dan abadi daripada pegangan kultural yang relatif dan temporer sifatnya.

Jadi pada akhir dekade 1990an Indonesia sebagai suatu entitas peradaban tidak hanya rentan pada dimensi ekonomi, politik, dan sosialnya saja, tetapi juga pada dimensi kulturalnya. Observasi ini pada dimensi sejarah sepertinya mengkonfirmasi kebenaran teori siklus sosialnya Batra (1987), yang mempercayai berlakunya determinasi sejarah berupa tunduknya setiap entitas peradaban terhadap siklus sosialnya sendiri. Siklus sosial adalah siklus gelombang pasang surutnya suatu entitas peradaban dalam segala dimensinya yang rentang waktunya dalam perjalanan sejarah untuk setiap unit gelombangnya relatif konstan. Untuk Indonesia tampaknya rentang waktu itu adalah sekitar 20-30 tahun, sehingga atas dasar seri pembusukan multidimensional dekade 1940an, 1960an, dan 1990an, teori ini memprediksikan bahwa nanti pada sekitar pertengahan sampai akhir dekade 2020an akan ada lagi krisis multidimensional di Indonesia. Di sekitar setiap titik nadir dalam siklus itu, seperti pada paruh ke dua dekade 1960an dan 1990an tentunya lingkungan usaha tidak kondusif. Teori ini memberikan harapan bahwa peradaban Indonesia suatu saat akan keluar dari krisis sekarang ini oleh sinergi berbagai kekuatan internalnya sendiri, sementara krisis itu sendiri akan berlangsung selama paling tidak lima tahun.

Adalah kerentanan pada semua dimensi peradaban itulah yang memberikan peluang dan temtasi yang besar di kalangan para spekulan untuk mulai Juli 1997 berspekulasi dengan rupiah yang posisi nilai tukarnya menjadi sangat rentan, sehingga krisis keuangan Thailand dengan mudah merembet ke Indonesia. Faktor-faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sejarah itu juga memberikan peluang dan temtasi kepada para reformis dan penentang Soeharto untuk melancarkan pukulan beruntun secara telak, yang berakhir dengan runtuhnya rezim Soeharto. Jatuhnya Soeharto menyebabkan terpojoknya pusat-pusat kekuatan politik Orde Baru yang

berada di sekitar Keluarga Soeharto, ABRI, dan GOLKAR, dan juga terpojoknya pusat-pusat kekuatan ekonomi Orde Baru yaitu bisnis keluarga Soeharto dan croniesnya. Ekonomi dan politik Indonesia pun menjadi limbung karena terlepas dari angkor kestabilannya dan market confidence yang selama tiga dekade terakhir terikat erat pada angkor tersebut menjadi buyar. Keadaan itu diperparah oleh berbagai kerusuhan sosial yang terjadi di sekitar saat jatuhnya Soeharto pada bulan Mei 1998, yang membuat pasar yang sudah terbukti sensitif terhadap kerusuhan sosial (Asri, 1998) menjadi lebih sensitif lagi. Saat ini lingkungan usaha di Indonesia sangat tidak kondusif karena terlalu peka terhadap isu-isu sosial, politik, dan ekonomi.

Berbagai kerentanan Indonesia sebagai suatu entitas peradaban seperti telah diuraikan di muka ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sejarah dalam lingkungan bisnis terrefleksi dalam berbagai patologi bisnis, yang sebagian besar bersifat struktural, seperti pada tabel 1 (Sudibyo, 1998c). Tabel itu juga menunjukkan resiko, kerawanan, dan cost yang ditimbulkan oleh masing-masing Patologi.

Tabel 1. Patologi Sektor Bisnis

Patologi	Kerawanan/Resiko/Cost
1. Tingginya keterkaitan bisnis, terutama yang besar, dengan politik	- Kegoncangan politik bisa berakibat fatal ada keberlangsungan bisnis
2. Tingginya tingkat keterlibatan bisnis dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme di sektor negara	- Reformasi politik terhadap KKN berakibat fatal terhadap keberlangsungan bisnis
3. Tingginya campur tangan birokrasi terhadap bisnis	- Stabilitas politik makro menjadi begitu menentukan bagi keberlangsungan bisnis
4. Tingginya tingkat konsentrasi industri	- Pasar menjadi tidak efisien dan temtasi bisnis untuk berkolusi dengan kekuasaan menjadi besar, dan karenanya resiko politik juga menjadi besar.
5. Tingginya tingkat illegalitas/informalitas dalam pemilikan, permodalan, perkreditan, perpajakan, perijinan, dan lain sebagainya	- Rendahnya kepastian hukum dan tinggi nya biaya transaksi karena rente ekonomi.
6. Rendahnya mutu akuntabilitas kepada pemilik, pemerintah, dan publik	- Tingginya ancaman tuntutan hukum
7. Ketergantungan yang tinggi pada bahan baku impor.	- Tingginya resiko finansial karena kemerosotan kurs rupiah
8. Tingginya tingkat leverage	- Tingginya resiko insolvency
9. Tingginya tingkat dominasi etnik non-pribumi	- Rentan terhadap kerusuhan sosial yang Berbau SARA
10. Sektor Perbankan yang sakit	- Tingginya cost of capital

2. PARADIGMA PEMULIHAN

Judul makalah ini, yang tidak disukai oleh penulis ini, adalah pilihan Panitia Seminar Sidang Pleno ISEI ke-9 yang dimintakan kepada penulis ini untuk mem bahas nya. Digunakannya kata "PEMULIHAN" -yang menjadi sumber ketidaksukaan penulis ini- , meskipun kelihatannya sepele tetapi berimplikasi jauh

dan dalam karena menunjukkan suatu kerangka berpikir anti reformasi. Kerangka berpikir ini dilandasi oleh beberapa asumsi implisit tentang krisis sekarang ini, yang penulis ini tidak bisa menyetujuinya, yaitu:

- a. bahwa tampaknya ekonomi Indonesia yang sedang dilanda krisis sekarang ini dipandang suatu saat akan bisa rebound untuk kembali "pulih" ke kondisi semula;
- b. bahwa tampaknya ekonomi Indonesia dipandang cukup lentur dan robust terhadap pukulan beruntun berbagai faktor penyebab krisis seperti yang telah diuraikan di muka, dan pukulan beruntun itu dianggap tidak meninggalkan bekas berupa permanent damage yang irrecoverable pada ekonomi Indonesia; pukulan beruntun itu dianggap hanya meninggalkan memar-memar di tubuh ekonomi Indonesia yang oleh seorang dokter ahli bisa dengan mudah disembuhkan hingga tubuh bisa "pulih" kembali mulus seperti sedia kala;
- c. bahwa tampaknya dipandang ada hubungan koritinitas antara ekonomi Indonesia pra dan pasca krisis; berbagai faktor penyebab krisis dipandang tidak menyebabkan putusnya kontinuitas tersebut, dan bahkan gerakan reformasi dipandang tidak bertujuan untuk memutus hubungan kontinuitas tersebut.

Untuk selanjutnya kerangka berpikir seperti itu dalam makalah ini disebut **"paradigma pemulihan."**

Jika kerangka berpikir menurut paradigma pemulihan yang mengasumsikan rebound, temporary-recoverable damage, dan kontinuitas ini kita ikuti secara seksama dan konsisten, maka lingkungan usaha dan ekonomi Indonesia seharusnya akan "pulih" kembali seperti sedia kala jika yang diinginkan memang sekedar pemulihan apabila:

- a. krisis ekonomi Asia telah berakhir dan bisa menemukan kembali momentum pertumbuhannya yang spektakuler selama tiga dekade terakhir sebelum krisis;
- b. masalah tingginya tingkat leverage ekonomi Indonesia sudah bisa diatasi; dan
- c. bisa direayasa suatu gerakan kontra reformasi untuk mengembalikan kekuasaan Soeharto dan rezim Orde Barunya.

Cara berpikir seperti itu tentu tidak populer dan bisa dituduh anti reformasi. Namun demikian, dalam kenyataannya sekarang masih banyak pengamat ekonomi atau bisnis, bahkan yang paling vokal sekalipun, yang menyodorkan solusi yang

penuh dengan retorika reformasi atas krisis ekonomi dewasa ini tetapi tanpa disadari didasarkan pada asumsi implisitnya paradigma pemulihan seperti telah diutarakan di muka. Bahkan, tampaknya pemikiran sebagian besar pejabat penting Pemerintah juga masih dikungkung oleh paradigma pemulihan ini, seperti tampak dalam kosa kata dan retorika yang sering mereka dengungkan. Tidak aneh makanya kalau rezim yang berkuasa sekarang sering dituduh sebagai perpetuasi atau pelanjutan rezim Orde Baru. Tentu saja cara berpikir yang tidak konsisten seperti itu tidak akan efektif dalam memberikan formulasi cara keluar dari krisis. Cara berpikir seperti itu dalam stereo-typenya Syahrir disebut *business as usual* dan tidak mempunyai *sense of crisis*. Sebetulnya stereotype ini tidak hanya berlaku bagi Pemerintah tetapi juga bagi sebagian besar pengamat ekonomi dan bisnis.

3. PARADIGMA REFORMASI

Reformasi hanya akan berhasil jika betul-betul radikal dalam arti sampai ke tataran reformasi kerangka berpikir. Jika kerangka berpikir kita untuk menyelesaikan krisis hanyalah merupakan perpetuasi atau pelanjutan dari kerangka berpikirnya Orde Baru seperti tampak jelas pada paradigma pemulihan, maka reformasi hanya akan terjadi pada kulitnya saja, tidak akan pernah menyentuh substansi (Sudibyo 1998b). Ke tiga asumsi yang mendasari paradigma pemulihan adalah tidak benar dan anti reformasi, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Barangkali pukulan krisis ekonomi Asia terhadap ekonomi Indonesia memang tidak cukup telak untuk sampai memutus hubungan kontinuitas antara ekonomi Indonesia pra dan pasca reformasi, akan tetapi, gerakan reformasi yang di trigger oleh krisis Asia tersebut jelas-jelas bertujuan untuk memutus sebagian besar hubungan kontinuitas tersebut; Jika masih ada sebagian kecil hubungan kontinuitas yang dipertahankan adalah untuk menjaga agar tidak sampai terjadi disintegrasi dan vakum, agar Indonesia sebagai suatu entitas ekonomi, sosial, politik, dan budaya bisa survive menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang dihembuskan' oleh gerakan reformasi; oleh karena itu semua pemikiran yang menganggap bertahannya sebagian besar hubungan kontinuitas antara ekonomi-sosial-politik-budaya Indonesia pra dan pasca krisis harus dipandang sebagai pemikiran yang anti reformasi; situasi keterputusan itu barangkali sangat mirip

dengan situasi keterputusan sebagian besar hubungan kontinuitas antara Orde lama dan Orde Baru, di mana banyak hubungan kontinuitas yang memang sengaja diputus oleh Orde Baru dengan mempertahankan sebagian kecil saja hubungan kontinuitas itu agar Indonesia tidak sampai terdisintegrasi dan mengalami vakum, dan karenanya tidak mampu bertahan menghadapi krisis;

- b. ekonomi Indonesia selama era Soeharto hari demi hari semakin kehilangan kelenturannya karena senantiasa semakin eratnya keterkaitan antara bisnis dan politik, sementara sistem politik yang dikembangkan oleh Soeharto adalah sistem tertutup yang tidak lentur dan tidak mampu melakukan koreksi dan pembaharuan atas dirinya sendiri; pukulan gerakan reformasi telah menyebabkan irrecoverable permanent damage pada sistem politik tersebut, dan keterkaitannya yang erat dengan bisnis telah merembetkan irrecoverable permanent damage pada sistem politik tersebut ke sistem ekonomi;
- c. tidak akan ada rebound -yang berarti kembali ke kondisi sedia kala- ekonomi Indonesia ke kondisi sebelum krisis, karena sistem ekonomi, politik, dan sosial Indonesia sekarang ini, beserta budayanya, sedang mencari-cari fundamen, substansi, format, arah, dan pola pemihakan baru yang sama sekali berbeda dari fundamen, substansi, format, arah, dan pola pemihakan pada era Soeharto.

Tulisan ini dengan tegas menolak paradigma pemulihan yang mengasumsikan rebound, temporary-recoverable damage, dan kontinuitas itu, karena pada hakekatnya paradigma pemulihan itu anti reformasi, pro status quo, dan retrospektif. Sebagai gantinya penulis menyodorkan paradigma reformasi yang: 1) tidak mengharapkan rebound yang memang tidak akan dan tidak boleh ada, 2) dengan ikhlas menerima kenyataan permanent-irrecoverable damage yang berarti bahwa kita harus memulai lagi membangun ekonomi Indonesia pada suatu start yang jauh lebih rendah dari tingkat kemajuan ekonomi yang telah berhasil dicapai pada Juli 1997, dan c), secara sadar memutuskan hubungan kontinuitas antara sistem ekonomi-politik-sosial dan budaya pra dan pasca krisis, dan karena tiga alasan itu maka paradigma ini pro reformasi, anti status quo, dan bervisi prospektif. Paradigma ini menerima krisis ekonomi dan politik sekarang ini sebagai kenyataan yang harus dilalui, betapapun pahitnya, dan sebagai pengorbanan yang harus dibayar untuk mencapai tujuan

reformasi. Reformasi pada hakekatnya adalah penggantian secara menyeluruh tatanan lama kehidupan bernegara dan berbangsa yang dipandang tidak lagi sesuai dengan kebutuhan, dengan suatu tatanan baru yang sama sekali berbeda. Perubahan besar-besaran seperti itu tidak mungkin berlangsung tanpa suatu krisis multidimensional. Paradigma ini ingin membangun sistem ekonomi-politik-sosial dan budaya yang fundamen, substansi, format, arah, dan pola pemihakannya sama sekali berbeda dari yang ada pada sistem ekonomi-politik-sosial dan budaya Orde Baru. Fundamen sistem ekonomi-politik-sosial dan budaya menurut paradigma ini adalah "kontrak sosial" baru yang sama sekali berbeda dari kontrak sosial Orde Baru yang dirancang terutama oleh Soeharto, ABRI dan Angkatan 66. Paradigma ini memandang gerakan reformasi, setelah berhasil menumbangkan Soeharto, sekarang ini sedang dalam proses sosial merumuskan kontrak sosial baru tersebut, yang pada prediksi dan harapan penulis isinya mengarah pada:

- a. redefinisi peran sopol dan dwifungsi ABRI,
- b. terbentuknya masyarakat madani yang demokratis,
- c. supremasi hukum di atas kekuasaan;
- d. *good governance* (Sudibyo, 1998a);
- e. akuntabilitas dan tanggung jawab sosial dunia bisnis, terutama yang besar;
- f. pengakuan dan penghormatan HAM baik oleh negara maupun individu anggota masyarakat;
- g. social market economy dengan distorsi harga yang minimal (Jung, 1990);
- h. kedaulatan rakyat dan keadilan sosial;
- i. peradaban transisional menuju peradaban industrial yang semakin menjunjung tinggi profesionalisme dan meritokrasi.

Kontrak sosial baru itu akan sama sekali menghentikan dan menggantikan kontrak sosial lama yang sering diberi label "Orde Baru" itu. Proses sosial berikutnya adalah penentuan substansi, format, arah, dan pola pemihakan sistem politik, ekonomi, dan sosial baru tersebut yang konsisten dengan dan merupakan konsekwensi logis dari kontrak sosial baru tersebut. Keseluruhan proses sosial itu akan memakan waktu tidak sebentar. Belajar dari sejarah, Orde Baru yang membuat kontrak sosial secara represif memerlukan waktu 3-5 tahun untuk menyelesaikan

proses sosial semacam itu. Cara represif memang efisien, tetapi cara seperti itu harus sudah ditinggalkan karena melanggar HAM, anti demokrasi, dan karenanya anti reformasi. Filipina memerlukan satu periode jabatan kepresidenan Corry Aquino untuk menyelesaikan proses itu — sementara pada masa itu ekonomi Asia Timur dan Tenggara pada umumnya tumbuh di atas 5% — sebelum ekonomi Filipina kemudian bisa tumbuh baik pada masa Presiden Ramos.

Dalam kaitan itu maka adalah tidak realistis jika sementara pengamat mencoba mencari solusi atas krisis dewasa ini dengan mengacu pada krisis keuangan Mexico yang bisa diatasi dalam waktu 2-3 tahun, karena krisis keuangan Mexico tidak ditrigger oleh krisis moneter di kawasan Amerika Tengah, dan di Mexico pada waktu itu tidak ada krisis multidimensional seperti di Indonesia sekarang. Mereka yang suka mengacu pada krisis Mexico adalah yang menganut paradigma pemulihan, karena di Mexico memang ada rebound, tidak ada irrecoverable-permanent damage, dan ada kontinuitas sistem ekonomi, politik, dan sosial. Bahkan krisis Filipina pada dekade 1980an pun juga bukan acuan yang baik mengingat krisis politik di Filipina pada waktu itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan krisis moneter di Asia. Jadi, krisis di Indonesia sekarang ini lebih parah daripada krisis Mexico dan krisis Filipina, dan karenanya mungkin sekali akan memerlukan waktu yang lebih lama untuk keluar dari krisis daripada yang dilalui oleh Mexico dan Filipina. Apalagi jika diperhitungkan kenya-taan bahwa Indonesia secara geografis, demografis, dan antropologis lebih besar dan lebih heterogen daripada Filipina dan Mexico, sehingga proses penciptaan ekuilibrium dan sinergi baru di Indonesia tentunya akan memerlukan upaya dan sumberdaya yang lebih besar serta waktu yang lebih lama. Oleh karena itu; dan mengingat pula siklus sosial yang telah diutarakan di muka, penulis memperkirakan diperlukan paling tidak lima tahun bagi Indonesia untuk bisa keluar dari krisis sekarang ini.

Dengan tumbangya Soeharto beserta rezim Orde Barunya, maka sistem ekonomi dan politik Indonesia kehilangan center of gravitynya, menjadi melayang-layang tidak stabil. Proses sosial pembentukan kontrak sosial baru serta proses sosial pencarian substansi, format, arah, dan pola pemihakan baru seperti tersebut di muka harus dipandang sebagai proses mencari titik berat baru yang akan menjadi angkor baru bagi ekuilibrium politik, ekonomi, dan sosial yang baru pula. Titik berat baru itu

diharapkan untuk tidak lagi mengambil tempat di diri seorang tokoh kuat seperti pada Orde Baru dan Orde Lama (Sudibyo 1998b), melainkan melembaga pada perimbangan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang ada pada masyarakat sipil yang demokratis. Selama proses sosial itu belum selesai maka lingkungan usaha di Indonesia akan tetap merupakan lingkungan yang bising, bergejolak, riskan, dan tidak kondusif bagi kegiatan bisnis pada umumnya.

4. YANG PERLU DILAKUKAN SELAMA PROSES SOSIAL BERLANGSUNG

Resep ekonomi apapun untuk keluar dari krisis sekarang ini selalu mengasumsikan dan mensyaratkan adanya kestabilan politik dan sosial, yang pada gilirannya akan menjamin kestabilan ekonomi. Inilah pelajaran warisan Soeharto yang telah teruji kebenarannya selama tiga dekade pemerintahannya. Proses sosial seperti diungkapkan di muka adalah proses yang harus dilalui untuk menuju kestabilan politik dan sosial tersebut. Ekonomi Indonesia akan tumbuh positif lagi jika modal yang lari keluar negeri dan modal asing sudah mau kembali masuk ke Indonesia, dan itu baru akan terjadi jika proses sosial itu sudah selesai dan menghasilkan kestabilan dan ekuilibrium ekonomi, politik, dan sosial baru. Tanpa adanya kestabilan, adalah tidak realistis untuk sekarang ini mengharapkan bisa menurunkan tingkat inflasi dan tingkat bunga serta memperkuat nilai tukar rupiah sampai pada tingkat yang diharapkan dan masuk akal. Dus, yang terpenting pada tahap ini adalah stabilisasi.

Proses sosial itu jika dibiarkan berlangsung secara apa adanya akan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan bisa berakhir pada disintegrasi. Oleh karena itu perlu upaya yang serius oleh semua pihak tidak hanya Pemerintah untuk mengakselerasi proses sosial tersebut, meskipun penulis menyadari bahwa itu sulit, karena proses sosial itu hanya akan efektif jika dilakukan dengan cara-cara yang demokratis. Cara-cara represif seperti yang dilakukan Soeharto pada awal Orde Baru barangkali akan lebih efisien, tetapi cara itu kemungkinan besar hanya akan menghasilkan tatanan masyarakat yang mirip dengan tatanan Orde Baru dengan segala patologinya.

Dalam kaitan itu penulis berpendapat bahwa pembenahan di tubuh kekuatan politik Orde Baru terkuat ke dua setelah Soeharto, yaitu ABRI, menjadi sangat

krusial, karena keberhasilan pembenahan di tubuh ABRI akan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan pembenahan kekuatan-kekuatan sosial, politik, dan ekonomi yang lain. ABRI harus direformasi total agar secara struktural dan kultural betul-betul sesuai dengan kehendak reformasi. Pembenahan ABRI, termasuk proses hukum yang transparan dan independen atas tuduhan dosa-dosa ABRI di masa lalu kasus penculikan aktivis pro-demokrasi, kasus penembakan mahasiswa Tri Sakti, kasus penjarahan-pembakaran-pemerkosaan Mei 1998, kasus 27 Juli 1996, kasus Timika, kasus Timor-Timur, kasus Aceh, kasus Lampung, Kasus Tanjung Periok, kasus Haor Koneng, kasus Marsinah, kasus Udin, Kasus Sampang, dan lain sebagainya merupakan pre-requisite bagi reformasi hukum, sosial, politik dan ekonomi secara total dan tuntas, termasuk di dalamnya pengusutan atas harta kekayaan Soeharto. Untuk itu barangkali perlu adanya mobilisasi masa untuk mendukung dan sekaligus mengawasi langkah-langkah pembenahan yang sedang dilakukan oleh Jenderal Wiranto agar ia tidak ragu-ragu dan tidak pandangbulu.

Proses sosial itu sudah dan masih akan terus menelan korban-korbannya terutama mereka yang politis, ekonomis, dan sosial marjinal. Oleh karena itu program social safety nets seperti yang sudah dilakukan Pemerintah perlu dilanjutkan dengan lebih tepat sasaran, dan dijaga untuk tidak terlaui berdampak inflatoar. Program ini penting bagi kondusivitas lingkungan usaha, karena teriakan dan jeritan para korban itu membuat lingkungan usaha menjadi bising dan kebisingan itu sangat mempengaruhi ekspektasi pasar akan adanya kerusuhan dan penjarahan. Namun demikian perlu disadari bahwa demo-kraasi by nature memang bising, akan tetapi lama kelamaan, setelah terbiasa, telinga pasar akan menjadi lebih peka dan mampu membedakan antara kebisingan karena demokrasi dan kebisingan karena anarki.

Di samping melaksanakan social safety net programs, sebagai bagian dari proses sosial itu, Pemerintah juga perlu menghilangkan berbagai patologi bisnis warisan Orde Baru, yang sebagian besar bersifat struktural, seperti telah dipaparkan padatable 1, dengan mengacu pada isi kontrak sosial baru yang masih hipotetis tersebut. Tiga patologi yang pertama bisa diatasi dengan good governance (Sudibyo, 1998a). Tingginya tingkat konsentrasi industri bisa diatasi dengan undang-undang anti-monopoli dan oligopoli. Informalitas dan illegalitas dalam bisnis bisa diatasi

dengan reformasi hukum secara tuntas dan menyeluruh. Rendahnya kualitas akuntabilitas kepada para stakeholders disebabkan karena kolusi antara bisnis dengan akuntan publik yang dimungkinkan oleh tingginya tingkat illegalitas dalam bisnis. Reformasi hukum, dengan demikian akan mengatasi masalah ini. Di samping itu privilese yang selama ini diberikan Pemerintah kepada akuntan publik untuk mengatur dirinya sendiri perlu dibatasi pada masalah-masalah teknis akuntansi dan auditing saja, sementara masalah perilaku bisnis para akuntan publik perlu diatur dengan undang-undang. Ketergantungan industri pada bahan baku impor perlu diatasi dengan strategi industrialisasi yang lebih resource based. Tingginya tingkat leverage sampai melampaui batas yang dibenarkan oleh hukum perlu diatasi dengan undang-undang kepailitan dan reformasi hukum bisnis secara tuntas dan total, di samping melaksanakan skema INDRA. Untuk mengatasi tingginya tingkat dominasi etnik nonpribumi dalam bisnis barangkali Indonesia perlu belajar dari Malaysia yang telah menunjukkan hasil nyata dalam menangani masalah ini Sudibyo (1997). Akhirnya, pembenahan sektor perbankan perlu dilaksanakan dengan lebih cepat, tegas, dan konseptual, dengan keberanian untuk mengusut secara hukum para bankir yang diduga telah menggelapkan secara illegal dana milik masyarakat dan Bank Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abeng, Tanri (1998), "Restrukturisasi dan Privatisasi BUMN," Dipresentasikan pada Seminar Nasional Forum Komunikasi Penelitian Manajemen dan Bisnis Tahun VI, tanggal 27 Juni di Yogyakarta.
- Batra, Ravi (1987), *The Great Depression of 1990*, New York: New American Library.
- Booz, Allen & Hamilton, "Revitalizing The Korean Economy toward the 21st Century," presented in a Seminar conducted by Bank Negara Indonesia in cooperation with The Jakarta Chapter of the Indonesia Economists Association, July 9, 1998.
- Rahardjo, Dawam (1998), "INDRA, Sang Dewa Angin," Kompas 27 Juli 1998
- Sairin, Safri (1999.),
- Schwarz, Adam (1994), *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*, Singapore: Chong Moh Offset Printing.
- Sudibyo, Bambang (1997),
- Sudibyo, Bambang (1998a), "Good Governance sebagai Prasyarat Keberhasilan Reformasi Ekonomi," Makalah dalam rangka hearing Komisi VIII DPR-RI dengan Universitas Gadjah Mada, tanggal 9 Juni 1998.

- Sudibyo, Bambang (1998b), "Mengurai Benang Kusut Ekonomi Indonesia," Working Paper.
- Sudibyo, Bambang (1998c), "Reformasi Bisnis Dalam Konteks Krisis 1997/1998," dipresentasikan pada Seminar Nasional Forum Komunikasi Penelitian Manajemen dan Bisnis tahun IV, 27 Juni 1998, di Yogyakarta.
- Suryawijaya, Marwan Asri (1998), "Reaksi Pasar Modal Indonesia terhadap Peristiwa Politik Dalam Negeri (Event Study) pada Peristiwa 27 Juli 1996," *Kelola*, No. 18/ VII/1998
- Jung, Winfried (ed., 1990), *Social Market Economy*, Sankt Augustin, Germany: Hans Richarz Publication-Service.